

Efektivitas Kebijakan Pengamanan Harga Gabah Petani Pada Pelaksanaan DPM- LUEP di Kabupaten Lombok Barat

Effectivity of Price Security Policy of Farmers' Rice through DPM-LUEP in West Lombok District

I Ng. Mandra

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB

Suparmin Dan Taslim Sjah

Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Abstrak

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Pembangunan pertanian yang mendapat prioritas utama adalah sub sektor tanaman pangan yang salah satunya adalah padi. Padi merupakan bahan makanan pokok sekitar 95% penduduk Indonesia, sehingga merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional. Kebijakan pengamanan harga merupakan salah satu komponen kebijakan perberasan nasional untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan nasional. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten sentra produksi padi di Nusa Tenggara Barat. Pada musim panen raya, panen serempak dan gabah melimpah menyebabkan harga jual gabah petani menjadi rendah. Kabupaten Lombok Barat juga telah melaksanakan program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang bertujuan untuk menjaga harga jual gabah di tingkat petani agar tetap aman, untuk meningkatkan pendapatan petani, dan menumbuhkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan serta meningkatkan ketahanan pangan daerah di desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) Efektivitas Kebijakan pengamanan harga gabah di kabupaten Lombok Barat; (2) Efektivitas Sistem Kerja Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan pada pelaksanaan program Dana Penguatan Modal di kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat pada bulan Desember 2007 terhadap pelaksanaan program DPM-LUEP Tahun 2005-2007. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptive dengan tehnik survei. Data yang diperoleh dianalisis dengan Regresi Logistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan pengamanan harga gabah pada tahun 2005-2007 kurang efektif. Efektivitas kebijakan pengamanan harga tahun 2005-2007 mencapai 72,92 %. Efektivitas kebijakan pengamanan harga gabah (KPHG) dipengaruhi proses pembelian (PB). Secara parsial efektivitas kebijakan akan meningkat bila dilakukan pembelian secara langsung. Proses Pembelian langsung meningkatkan

harga yang diterima petani. Efektifitas sistem kerja LUEP di Kabupaten Lombok Barat adalah baik untuk tahun 2005, dan sangat baik untuk tahun 2006 dan 2007. Peranan LUEP relatif kecil dan tidak efektif dalam kebijakan pengamanan harga gabah karena berbagai kendala.

Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Harga Pasar Gabah, Pendapatan, Ketahanan Pangan.

Abstract

Agricultural development is directed toward increasing farmer's income and welfare. Agricultural development that is put as first priority is food crop sub sector and one of them is rice. Rice is staple food of nearly 95 % of Indonesian so as a strategic commodity in national socio economic life. Price Security Policy of Farmers' Rice is one of national rice policy to increase farmer's income and strengthen food security. West Lombok District is one of rice production centre in the Province of West Nusa Tenggara. In a great harvest season, rice is harvested at the same time therefore there is abundant of rice supply that directs the price is going low. On the other side, farmer requires amount of fresh cash for their cost of living and for following farm business. This situation forces farmer to sell their harvested rice at low price. West Lombok District also conducts a Price Security Policy of Farmers' Rice through Capital Strengthen Fund for Rural Economic Business Institution (DPM-LUEP) that directs to secure rice price at farm gate, to increase farmer's income, to grow good rural business institution, and to strengthen rural food security. The objective of this study is to analyze; (1) The effectiveness of rice price security policy; (2) The effectiveness of LUEP's working system in West Lombok District. This study has been conducted in West Lombok District on December 2007 to evaluate the implementation of DPM-LUEP fiscal year 2005 – 2007. Method employed to this study is descriptive method with survey technique. Data collected were analyzed under Logistic Regression. The result of this study reveals that the policy of rice price policy in 2005 – 2007 is less effective. Effectivity of rice price policy in 2005 – 2007 reaches up to 72.92 %. Rice price in 2007 has the least variance coefficient therefore it was relatively more stable than those of in 2005 and in 2006. Effectivity of rice price security policy or kebijakan pengamanan harga gabah (KPHG) by purchasing process (PB). Partially, effectivity will increase if direct purchasing is conducted because the price at farmer level is increase as well. Effectivity of LUEP's working system in West Lombok District is 'good' for 2005 and 'very good' for 2006 and 2007. The role of LUEP is relatively low and ineffective in the rice price security policy due to several obstacles.

Keywords: Policy effectivity, Rice's marketing price, Income, Food Security

Pendahuluan

Latar Belakang

Peran ekonomi beras terhadap ekonomi nasional akhir-akhir ini menurun, tetapi peran tersebut masih tetap signifikan, dan merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional, karena beras menjadi bahan makanan pokok sekitar 95 % penduduk di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2005 di Nusa Tenggara Barat, luas panen padi 300.394 ha, produktivitas 45,54 ku/ha dan produksi mencapai 1.367.869 ton; pada tahun 2006 luas panen padi 341.418 ha, produktivitas 45,48 dan produksi mencapai 1.552.627 ton; dan pada tahun 2007, luas panen mencapai 327.791 ha dengan produktivitas 45,83 ku/ha, sehingga produksi mencapai 1.502.270 ton (Dinas Pertanian, 2007).

Berdasarkan posisi strategisnya, pemerintah berkepentingan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah/ beras, karena gejolak yang tajam dapat berdampak terhadap usahatani dan kesejahteraan petani. Sesuai pola produksi tahunan tanaman padi yang mengikuti musim, pada saat panen raya produksi gabah melimpah dan harga jual relatif murah cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat di luar musim panen volume produksi lebih rendah dari volume kebutuhan sehingga harga gabah cenderung meningkat yang dapat memberatkan konsumen (Departemen Pertanian, 2006).

Pada tahun 2005 kebijakan perberasan diatur dalam Inpres No. 2 tahun 2005, tahun 2006 kebijakan perberasan diatur dalam Inpres No. 13 tahun 2005, dan tahun 2007 kebijakan perberasan diatur dalam Inpres No. 3 tahun 2007. Kebijakan perberasan antara lain mengatur penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan persyaratan terhadap Harga Pembelian Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling (Departemen Pertanian, 2007). Selanjutnya untuk mendukung kebijakan Pemerintah ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 10 Januari 2004 telah mengeluarkan keputusan nomor 9/ MPP/ Kep/ 1/ 2004 tentang ketentuan impor beras, yang antara lain mengatur tentang pelarangan impor beras dalam masa panen 1 (satu) bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya. Penentuan masa panen raya ditetapkan oleh menteri pertanian (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2004). Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional, serta memperhatikan perkembangan perekonomian nasional, maka pemerintah berupaya untuk melakukan pengamanan harga gabah saat panen raya.

Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) merupakan salah satu program kegiatan pembangunan pada Departemen Pertanian. Program kegiatan DPM-LUEP ini pada prinsipnya bertujuan membantu petani memperoleh harga minimal sesuai HPP, dengan melakukan pembelian langsung gabah petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada masa panen raya atau pada saat harga turun dan berada dibawah HPP.

Departemen Pertanian telah melaksanakan kegiatan DPM-LUEP sejak tahun 2003. Pada tahun 2007, Departemen Pertanian telah mengalokasikan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dana talangan kepada LUEP sebesar Rp.231.540.000.000, dan kegiatan DPM-LUEP di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Badan Urusan Ketahanan Pangan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang mendapat alokasi dana talangan yang cukup besar karena proses pengelolaan dana tersebut cukup tertib. Selama tiga tahun terakhir alokasi dana di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari 20 % dari total dana.

Sehubungan dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah stabilitas harga gabah dan meningkatkan pendapatan petani di masa yang akan datang.

Perumusan Masalah

Pada musim panen raya, panen serempak dan gabah melimpah menyebabkan harga jual gabah petani menjadi rendah. Di sisi lain pada saat yang sama petani membutuhkan dana tunai dan segera untuk keperluan rumah tangga atau biaya usahatani, maka petani terpaksa menjual gabahnya dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak/pengijon lokal (pengumpul). Pada beberapa wilayah mutu gabah yang dihasilkan oleh petani kurang baik (belum memenuhi syarat kualitas) karena belum optimalnya kegiatan pra-panen dan pasca-panen (Departemen Pertanian, 2006).

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) bergerak dalam usaha perdagangan gabah/beras, dan dengan adanya dana talangan yang diterima diharapkan dapat melakukan pembelian serta menampung lebih banyak gabah hasil panen petani pada saat panen raya, sehingga kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan dapat berkembang dan harga jual gabah pada gabungan kelompok tani mitra dapat mencapai harga minimal sama dengan HPP.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan pengamanan harga gabah yang telah dilaksanakan efektif dalam pengamanan Harga Gabah petani di Kabupaten Lombok Barat? dan bagaimana efektifitas sistem kerja Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam pengamanan harga gabah petani di kabupaten Lombok Barat ?

Metodologi Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survei, teknik penentuan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2005).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder yang berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner terhadap berbagai hal yang terkait dengan penelitian dan informasi yang perlu digali dari LUEP. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, yang berupa data time series dari tahun 2005 sampai tahun 2007.

Analisis Data

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengamanan harga gabah petani dianalisis secara deskriptif. Kebijakan pengamanan harga dikatakan efektif bila harga pasar gabah minimal sama dengan HPP. Efektivitas kebijakan dilihat dari persentase jumlah kejadian harga pasar gabah minimal sama dengan HPP.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dianalisis dengan analisis Regresi Logistik. Kebijakan pengamanan harga dikatakan efektif dengan pendekatan ekonometrika dari tingkat signifikansi variabel dependen (kebijakan pengamanan harga gabah petani) terhadap variabel independen (jumlah pembelian, harga pembelian, dan proses pembelian). Jika pengaruhnya signifikan, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikatakan efektif.

Untuk mengetahui sistem kerja Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dilakukan analisis secara deskriptif sebagai berikut. (a) Cara pembelian dan Saluran pemasaran di lapangan; (b) Jumlah penerimaan dana talangan yang digunakan untuk pembelian gabah di lapangan; (c) Perputaran pembelian oleh LUEP; (d) Jumlah petani yang menerima harga sesuai HPP dari LUEP; (e) Jumlah gabah yang dapat diserap/dibeli oleh masing-masing LUEP di dalam dan di luar Gapoktan; (f) Kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh LUEP; (g) Sistem pelaporan yang dibuat; (h) Koordinasi pelaksanaan program oleh LUEP.

Penilaian sistem kerja lembaga usaha ekonomi pedesaan dilakukan dengan menggunakan 2 jenis skala pengukuran yaitu sistem kerja yang berbentuk data menggunakan **skala ordinal** yang didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai yang terendah. Sistem kerja yang berbentuk sikap menggunakan **skala Guttman** yaitu skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas dan konsisten (Riduwan dan Akdon, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Kebijakan Pengamanan Harga Gabah

Tabel 1 Persentase Perbandingan Harga Pasar Gabah dengan HPP di Kabupaten Lombok Barat, Periode 2005 - 2007.

Tahun	Observasi (kali)	Harga di bawah HPP		Harga sama dengan HPP		Harga di atas HPP	
		(kali)	%	(kali)	%	(kali)	%
2005	48	12	25.00	0	0	36	75.00
2006	48	6	12.50	0	0	42	87.50
2007	48	21	43.75	9	18.75	18	37.50
Total	144	39	27.08	9	6.25	96	66.67

Sumber : Data Sekunder diolah

Pada Tabel 1 tampak bahwa pada tahun 2005 dan 2006 harga pasar gabah (HGP) di bawah HPP sebagian besar terjadi pada bulan Januari-April (sub round I), kecuali

tahun 2007 terjadi pada bulan Januari-April (sub round I), Mei-Agustus (sub round II) dan September.

Saifullah (2001) menyatakan bahwa masalah HGP di bawah harga dasar (HD) mulai terjadi pada masa panen (musim) 1998/1999, yaitu mencapai 6 persen pada masa panen Januari - Juni dan mencapai 12 persen pada masa panen Juli – Desember. Kecenderungan HGP di bawah harga dasar (HD) merupakan fenomena baru dan justru ancaman meningkat di luar musim panen raya. Fenomena HGP di bawah HD (sejak tahun 2005 HD menjadi HPP) di luar musim panen raya juga terjadi pada tahun 2007, yaitu terjadinya HGP di bawah HPP pada bulan Agustus dan September 2007.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien variasi harga pasar gabah (HGP) pada tahun 2005 sebesar 0,1219, pada tahun 2006 sebesar 0,0723, dan pada tahun 2007 sebesar 0,0083. Koefisien variasi terkecil ditunjukkan pada harga pasar tahun 2007, dan terbesar ditunjukkan pada harga pasar tahun 2005. Besaran koefisien variasi harga pasar menggambarkan stabilitasnya. Semakin kecil koefisien variasinya, maka harga pasar gabah semakin stabil. Dari nilai koefisien variasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2007 harga pasar gabah relatif lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2005 dan tahun 2006.

Harga pasar gabah (HGP) pada tahun 2005 dan tahun 2006 relatif lebih tinggi dari harga pembelian (HB). Harga Pembelian (HB) di bawah HGP dapat terjadi mengingat kelompok/ petani terikat kontrak pembelian secara tertulis antara kelompok tani dan LUEP dengan harga pembelian (HB) sesuai HPP di penggilingan. Sesuai dengan pendapat Anindita (2004) dan Budiono (2002) yang menyatakan jika petani menjual produknya pada pasar persaingan tidak sempurna mengakibatkan harga yang diterima tidak sesuai dengan harapan petani. Selain terikat dengan kontrak pembelian, penurunan produksi (volume penawaran) juga mengakibatkan harga pasar (HGP) naik.

Kebijakan Pengamanan Harga Gabah

Berdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 2) didapatkan bahwa uji chi square-model nilai P-value < 0.05 ($P=0.024$), artinya persamaan model tidak sesuai (non signifikan) dan menunjukkan bahwa kebijakan pengamanan harga gabah selama tiga tahun 2005-2007 belum efektif dipengaruhi oleh jumlah pembelian (JP), harga pembelian (HB), dan proses pembelian (PB) yang dilakukan oleh LUEP. Nilai keragaman kebijakan pengamanan harga gabah sebesar 14,5% di pengaruhi oleh keragaman jumlah pembelian (JP), harga pembelian (HB), dan proses pembelian (PB) yang dilakukan LUEP dan sebesar 85,5% dipengaruhi dari lembaga usaha lain (non LUEP) selama tahun 2005-2007. Dengan kata lain bahwa peranan LUEP relatif kecil hanya sebesar 14,5% dalam kebijakan pengamanan harga gabah dan peranan lembaga usaha lain lebih besar yaitu mencapai 85,5%, sehingga LUEP belum efektif dalam pelaksanaan kebijakan pengamanan harga gabah di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2005-2007.

Tabel 2. Uji Koefisien Regresi Logistik Harga Gabah di Kabupaten Lombok Barat

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	Significan	Keterangan
KPHG	1.124	0.506	0.026	*)**)
X1(JP)	0.000	0.000	0.438	
X2(HB)	0.000	0.000	0.240	
X3(PB)	3.220	1.781	0.071	*)
Observasi	= 84			

Sumber: Data primer diolah

Chi-square model (5%) = non signifikan

Chi-square model (10%) = signifikan

Nagelkerke R- square = 0.145

Keterangan **) = signifikan pada P 0.05

*) = signifikan pada P 0.10

Hasil pengujian secara parsial pada taraf nyata 5% menunjukkan bahwa kebijakan pengamanan harga gabah (KPHG) yang dilakukan oleh LUEP dipengaruhi tidak signifikan oleh faktor jumlah pembelian (JP), harga pembelian (HB), dan proses pembelian (PB). Pada pengujian pada taraf nyata 10% hanya proses pembelian (PB) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pengamanan harga gabah.

Efektivitas Sistem Kerja Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan

Sistem kerja LUEP di Kabupaten Lombok Barat tahun 2005 adalah baik dengan total nilai skor 71,04, Sistem kerja LUEP di Kabupaten Lombok Barat tahun 2006 adalah sangat baik dengan total nilai skor 83,21, Sistem kerja LUEP di Kabupaten Lombok Barat tahun 2007 adalah sangat baik dengan total nilai skor 83,47.

Tabel 3. Pemasaran Gabah dan Beras oleh LUEP di Kabupaten Lombok Barat, Periode 2005 - 2007

Saluran	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007	
	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)	(%)
Pembelian GKP	678.243		2.975.811		3.612.089	
Langsung Petani	625.943	92,29	2.524.419	84,83	3.374.771	93,43
- Satu Perantara	38.300	5,65	32.340	1,09	0	0
- Dua Perantara	14.000	2,06	405.770	13,64	237.318	6,57
-> 2 perantara	0		13.283	0,45	0	0
Nilai	15,61		14,81		15,47	
Penjualan	678.242		2.975.807		3.612.072	
- Gabah	135.504	19,98	268.961	9,04	565.092	15,64
- Beras	542.738	80,02	2.706.846	90,96	3.046.980	84,36

Pada Tabel 3, nilai pembelian gabah tertinggi pada tahun 2007 yaitu 15,47 dan terendah pada tahun 2006 yaitu 14,81. Namun apabila dilihat dari total kuantitas pembelian gabah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2005 sampai tahun 2007, berturut-turut sebesar 678.243 kg, 2.975.811 kg, dan 3.612.089 kg GKP.

Nilai pada cara pembelian gabah tahun 2006 masih rendah. Hal ini disebabkan relatif rendahnya persentase pembelian gabah oleh lembaga, dan masih ditemukan adanya pembelian gabah secara tidak langsung oleh lembaga. Pembelian gabah secara langsung kepada petani merupakan tujuan utama dari lembaga usaha (LUEP) dalam pengamanan harga gabah.

Apabila dilihat dari total jumlah dana, maka pada tahun 2007 jumlah dana relatif lebih rendah dari tahun 2006. Berkurangnya alokasi dana terkait dengan kinerja LUEP tahun sebelumnya secara keseluruhan di Nusa Tenggara Barat, terutama akibat keterlambatan pengembalian ke Rekening Kas Negara.

Perputaran pembelian gabah yang dilakukan lembaga terus meningkat selama tiga tahun terakhir dari tahun 2005 – 2007, dari satu kali menjadi lima kali. Peningkatan perputaran pembelian dapat meningkatkan jumlah pembelian (penyerapan). Peningkatan perputaran pembelian mengindikasikan adanya motivasi petani untuk menjual gabah kepada LUEP dan adanya motivasi LUEP untuk membeli gabah petani baik secara langsung maupun tidak langsung. Motivasi ini terkait dengan tingkat harga pembelian gabah sesuai harga kontrak yang mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan adanya motivasi tingkat harga akan menambah kegairahan petani untuk melaksanakan budidaya padi.

Tabel 4. Jumlah dan Perputaran Pembelian Gabah di Kabupaten Lombok Barat

Uraian	2005		2006		2007	
Pembelian GKP	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)	(%)
Petani dlm Gapoktan	625.943	92,29	2.197.593	73,85	3.027.751	83,82
Petani luar Gapoktan	0	0	326.826	10,98	347.020	9,61
Penebas	38.300	5,65	32.340	1,09	0	0
Pengumpul desa/kec	14,000	2,06	405.770	13,64	237.318	6,57
Pedagang lain	0	0	13.283	0,45	0	0
Jumlah	678.243		2.975.811		3.612.089	
Pembelian						
Perputaran Pembelian	(kali)	(%)	(kali)	(%)	(kali)	(%)
thd kontrak	1,13	112,83	2,71	270,96	5,44	544,49

Jumlah petani penerima harga sesuai HPP (minimal sama dengan HPP) meningkat dari 415 anggota gapoktan pada tahun 2005 menjadi 1.220 anggota pada tahun 2006. Pada tahun 2007 tidak terjadi peningkatan dari tahun 2006. Selanjutnya apabila kita lihat Tabel 4 tampak bahwa terjadi peningkatan kuantitas jumlah

pembelian gabah di dalam gapoktan tahun 2005-2007 dan peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan perputaran pembelian gabah. Peningkatan jumlah anggota dan peningkatan jumlah pembelian gabah terkait dengan tingkat harga pembelian gabah sesuai harga kontrak yang mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan melakukan kontrak jual-beli gabah antara kelompok tani dengan LUEP, maka anggota kelompok tani (petani) mendapatkan manfaat yaitu mendapatkan tingkat harga yang lebih tinggi melalui proses penjualan langsung kepada LUEP (rantai pemasaran pendek). Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardianto et al (2005) bahwa rantai pemasaran mempengaruhi harga jual gabah yang diterima petani.

Produksi gabah tahun 2005 sebesar 193.474,00 ton GKP terserap sebesar 678,24 ton GKP atau 0,35%. Tahun 2006 produksi gabah sebesar 204.538,62 ton GKP terserap sebesar 2.975,81 ton GKP atau 1,45%. Tahun 2007 produksi gabah sebesar 197.957,36 ton GKP terserap sebesar 3.612,09 ton GKP atau 1,83%.

Pada tahun 2007 penyerapan gabah relatif lebih tinggi dibanding dengan penyerapan gabah tahun 2005 dan tahun 2006, dan alokasi jumlah penyerapan mengikuti pola produksi gabah. Produksi gabah tertinggi tercapai pada sub round II yaitu sebesar 121.105,67 ton GKP (= 61,18%) dan penyerapan sebesar 2.286,27 ton (= 1,15%).

Administrasi LUEP secara keseluruhan relatif baik dan lengkap, namun perlu lebih ditingkatkan utamanya dalam penyajian data-data transaksi dan keuangan. Hasil observasi lapangan ditemukan bahwa buku-buku administrasi belum dimanfaatkan optimal untuk merekam kegiatan transaksi dan keuangan program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Administrasi yang kurang optimal tidak dapat memberikan informasi secara lengkap, cepat dan tepat waktu. Sesuai dengan Pedum (2007) dinyatakan bahwa lembaga (LUEP) wajib membuat pembukuan penggunaan DPM yang terdiri dari buku keuangan (penerimaan, pengeluaran, dan pengembalian), buku pembelian, dan buku penjualan (Departemen Pertanian, 2007b).

Sistem pelaporan lembaga selama tiga tahun baik/tertib. Namun masih dijumpai adanya data pelaporan yang kurang sinkron antara LUEP dan Kabupaten. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan dari LUEP ke Kabupaten dan Kabupaten ke Provinsi.

Sistem pelaporan yang dibuat lembaga sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pedum bahwa pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari lembaga, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir dengan menggunakan Form A dan dikirim kepada Badan/Dinas kabupaten yang menangani ketahanan pangan dengan tembusan kepada Badan/Dinas yang menangani ketahanan pangan Provinsi. Hasil rekapitulasi laporan Form A disusun dan disajikan dalam bentuk Form B oleh Badan/Dinas Kabupaten. Hasil rekapitulasi Form B disusun dan disajikan dalam bentuk Form C oleh Badan Provinsi (Departemen Pertanian, 2007).

Koordinasi pelaksanaan program di Kabupaten Lombok Barat prinsipnya ada dan telah melalui prosedur yang ditetapkan serta telah dilaksanakan. Kabupaten telah melakukan pertemuan yang melibatkan instansi dan pihak yang terkait untuk menetapkan pelaksana program. Hal ini sesuai dengan kehendak pedum bahwa

Bupati/Walikota melakukan koordinasi dengan melibatkan Instansi terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Asosiasi LUEP Kabupaten/Kota, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur (Departemen Pertanian, 2007).

Koordinasi pelaksanaan program ini penting untuk menciptakan relasi sosial melalui jaringan, institusi dan organisasi lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat Narayan (1997) dalam Mubangizi (2003) keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh **integrasi** dalam masyarakat dan hubungan dengan masyarakat luar, dan modal sosial menyangkut kemampuan untuk memperoleh manfaat dari adanya relasi sosial yang tereksprese melalui jaringan, institusi dan organisasi lokal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta terbatas pada lingkup penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengamanan harga gabah pada tahun 2005-2007 kurang efektif. Efektivitas kebijakan pengamanan harga tahun 2005-2007 mencapai 72,92 %. Harga gabah tahun 2007 memiliki koefisien variasi terkecil sehingga relatif lebih stabil dari harga gabah tahun 2005 dan tahun 2006.
2. Efektivitas kebijakan pengamanan harga gabah (KPHG) dipengaruhi 14,5% secara bersama-sama oleh faktor-faktor jumlah pembelian (JP), harga pembelian (HB) dan proses pembelian (PB). Secara parsial efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh proses pembelian (PB). Proses Pembelian langsung meningkatkan harga yang diterima petani.
3. Efektifitas sistem kerja LUEP di Kabupaten Lombok Barat adalah **baik** untuk tahun 2005, dan **sangat baik** untuk tahun 2006 dan 2007.
4. Peranan LUEP relatif kecil dan tidak efektif dalam kebijakan pengamanan harga gabah karena berbagai kendala.

Saran

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian, diajukan saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan program Dana Penguatan Modal di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan relatif kecil dana talangan khususnya di kabupaten Lombok Barat, maka Dinas/ instansi penanggung jawab program perlu mengusulkan penambahan dana pada Program Dana Penguatan Modal ke pusat dan mengupayakan adanya dana pendamping dari APBD provinsi NTB.
2. Untuk mengatasi permasalahan pencairan dana tidak tepat waktu, perlu adanya persiapan-persiapan yang lebih awal dari dinas instansi penanggung jawab program agar dana dapat dicairkan tepat waktu, sehingga dapat digunakan secara efektif untuk pembelian gabah. Selain persiapan-persiapan yang lebih

awal, perlu juga diusulkan penggunaan dana APBN dan APBD yang bersifat multi-years.

3. Untuk meningkatkan jumlah pelaksana program (LUEP), perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif di wilayah-wilayah yang belum mendapatkan pelayanan program LUEP di Kabupaten Lombok Barat. Peningkatan jumlah dan pendistribusian pelaksana program sesuai kondisi wilayah dapat meningkatkan jumlah penyerapan gabah pada musim panen.
4. LUEP tidak perlu membeli gabah bila harga pasar gabah sudah di atas HPP, kecuali kalau mau membeli di atas atau sama dengan harga pasar gabah.

Daftar Pustaka

- Anindita, R., 2004. Pemasaran Hasil Pertanian. Papyrus. Cetakan Pertama. Surabaya.
- Badan Urusan Katahanan Pangan Daerah, 2006. Laporan Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Mataram.
- _____, 2007. Laporan Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- Budiono, 2002. Ekonomi Mikro. BPFE – Yogyakarta. Edisi 2. Cetakan ke 23. Yogyakarta.
- Darwanto, D. H., 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. Ilmu Pertanian Vol. 12. Nomor 2. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2004. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor; 9/ MPP/ Kep/ 1/ 2004. Tentang Ketentuan Impor Beras. Tanggal 10 Januari 2004. Jakarta.
- Departemen Pertanian, 2005a. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2005. Tentang Kebijakan Perberasan. Tanggal 2 Maret 2005. Jakarta
- _____, 2005b. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2005. Tentang Kebijakan Perberasan. Tanggal 10 Oktober 2005. Jakarta
- _____, 2006a. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Badan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- _____, 2006b. Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani. Direktorat Jenderal Hortikultura. Jakarta.
- _____, 2007a. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2007. Tentang Kebijakan Perberasan. Tanggal 31 Maret 2007. Jakarta.

- _____, 2007b. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Badan Ketahanan Pangan. Jakarta
- Dinas Pertanian, 2006. Potensi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- _____, 2007 .Potensi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- Ilham, N., H. Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24. Nomor 2. Oktober 2006. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
- Long, J.S., 1997. Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. Sage Publications. Volume 7.
- Mardianto, S., Y. Supriatna, dan N. K. Agustin. , 2005. Dinamika Pola Pemasaran Gabah dan Beras di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23. Nomor 2, Ed. Desember 2005. Bogor.
- Narayan, D., 1997. Voices of the poor; proverty and social in Tanzania, dalam Mubangizi, B.C., 2003. Drawing on Social Capital for Community Economic Development; Insights from a South African Rural Community. Community Development Journal Vol. 38 No. 2 April 2003.
- Nuraini, I., 2005. Pengantar Ekonomi Mikro. Universitas Muhammadiyah Malang. UMM Pres. Ed. Pertama. Cetakan keempat. Malang.
- Nuryanti, S., 2005. Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Jurnal Agronomi, Volume 23 No.1 Ed. Mei 2005. Bogor.
- Ramdan, H., Yusran dan D. Darusman, 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah; Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Alqaprint. Bandung.
- Riduwan dan Akdon, 2006. Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
- Saifullah, A., 2001. Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional. <http://jakarta.litbang.deptan.go.id>. (download) tanggal 24 Agustus 2007.
- Sanim, B. 1988. Efektivitas Penyaluran dan Pengembalian KUT Pola Khusus, dalam Ilham, N., H. Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24. Nomor 2. Oktober 2006. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.

- Simatupang, P., 2002. Kelayakan Pertanian Sebagai Sektor Andalan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dalam Ilham, N., H. Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24. Nomor 2. Oktober 2006. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
- Sawit, M.H., 2006. Indonesia Dalam Tatanan Perubahan Perdagangan Beras Dunia. [http://jakarta.litbang.deptan.go.id/Majalah_Pangan.\(download\)](http://jakarta.litbang.deptan.go.id/Majalah_Pangan.(download)) tanggal 24 Agustus 2007.
- Suadnya, W., 1998. The Study of Successful and Less Successful Farmer Groups in the "Supra Insus" Program in West Lombok - Indonesia. School of Natural and Rural Systems Management The University of Queensland. Queensland.
- Sugiyono, 2005. Statistika untuk Penelitian. Cetakan ke delapan. Alfabeta. Bandung.
- Suryatna, A., S. Mardianto, dan M. Ikhsan, 2001. Dinamika Perberasan Nasional: Sebuah Pengantar. Penerbit LPEM-FEUI. Jakarta.
- Syahyuti, 2007. Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. [http://jakarta.litbang.deptan.go.id/Pustaka.\(download\)](http://jakarta.litbang.deptan.go.id/Pustaka.(download)) tanggal 20 Pebruari 2008.
- Todaro, M.P., 1995. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ke enam.
- Tomex, W.G. and K.L. Robinson, 1990. Agricultural Product Prices, dalam Nuryanti, S., 2005. Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Jurnal Agronomi, Volume 23 No.1 Ed. Mei 2005. Bogor.